

## **BANJIR DI SUMATERA SEBAGAI DAMPAK DEGRADASI LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL – SYARI'AH**

**Alayna Mazayahagie, Zakiyatul Alimah, Siti Nurkhofifah**

*KOPRI PMII Rayon Syari'ah Zubair Umar Al Jailani*

*[alaynamazaya@gmail.com](mailto:alaynamazaya@gmail.com)*

### **Abstract**

*The recurring floods in various regions of Sumatra Island indicate serious problems in environmental management. This phenomenon can no longer be understood solely as a natural disaster, but rather as a real impact of environmental degradation caused by human activities, such as land conversion, deforestation, and weak oversight of spatial utilization. This article aims to analyze flooding in Sumatra as a consequence of environmental degradation using the Maqāshid al-Syari'ah perspective as a normative-critical analytical framework. The methodology used is normative legal research that includes a conceptual approach and legislation, as well as an analysis of relevant national literature. The results of the study indicate that environmental degradation that leads to flooding contradicts the main objectives of Maqāshid al-Syari'ah, specifically the protection of life (ḥifẓ al-nafs), property (ḥifẓ al-māl), and the sustainability of life. Many impacts occur as a result of this phenomenon, including infrastructure, humanitarian, economic, and social aspects. Therefore, this article emphasizes that the integration of Maqāshid al-Syari'ah values is very important in the formulation and implementation of environmental policies as an effort to realize ecological welfare and justice.*

**Keywords:** Flood; Environmental Degradation; Maqashid al-Syari'ah; Sumatera.

### **Abtrak**

Banjir yang terus berulang di berbagai wilayah Pulau Sumatera menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pengelolaan lingkungan hidup. Fenomena ini tidak dapat lagi dipahami semata sebagai bencana alam, melainkan sebagai dampak nyata dari degradasi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan, deforestasi, dan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis banjir di Sumatera sebagai konsekuensi degradasi lingkungan dengan menggunakan perspektif Maqāshid al-Syari'ah sebagai kerangka analisis normatif-kritis. Metodologi yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yang mencakup pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, serta analisis terhadap literatur nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa degradasi lingkungan yang berujung pada banjir bertentangan dengan tujuan utama Maqāshid al-Syari'ah, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan

keberlanjutan kehidupan. Banyak dampak yang terjadi akibat dari fenomena ini, baik dari aspek infrastruktur, kemanusiaan, ekonomi, dan social. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Maqāshid al-Syari'ah sangatlah penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan ekologis.

**Kata Kunci:** *Banjir; Degradasi Lingkungan; Maqāshid al-Syari'ah; Sumatera.*

## **PENDAHULUAN**

Fenomena banjir yang terus terjadi berulang di berbagai wilayah Pulau Sumatera dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan alam. Berbagai studi menegaskan bahwa peningkatan frekuensi dan intensitas banjir di Indonesia sangat berkaitan dengan perubahan tata guna lahan dan degradasi daerah aliran sungai (DAS), bukan semata-mata faktor curah hujan ekstrem.<sup>1</sup> Di Sumatera, laju deforestasi yang tinggi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pembangunan infrastruktur telah mengubah fungsi hidrologis lanskap secara signifikan.<sup>2</sup> Perubahan tutupan hutan tersebut menyebabkan berkurangnya kapasitas infiltrasi tanah dan meningkatnya limpasan permukaan (*runoff*), yang pada akhirnya memperbesar potensi banjir.

Banjir tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai bencana alam yang bersifat alami, melainkan sebagai konsekuensi dari degradasi lingkungan yang dipicu oleh aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan, deforestasi, kerusakan DAS, serta pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan. Studi Tan-Soo et al. (2016)

---

<sup>1</sup> A V Bradley and et al., "Flood Risk and Land-Use Change in Southeast Asia," *Natural Hazards and Earth System Sciences* 20 (2020): 2565–81, <https://doi.org/10.5194/nhess-20-2565-2020>.

<sup>2</sup> B A Margono et al., "Primary Forest Cover Loss in Indonesia over 2000–2012," *Nature Climate Change* 4 (2014): 730–35, <https://doi.org/10.1038/nclimate2277>.

menunjukkan bahwa kehilangan tutupan hutan di Indonesia secara signifikan meningkatkan probabilitas terjadinya banjir pada wilayah hilir.<sup>3</sup> Hal ini diperkuat oleh temuan Wells et al. (2016) yang menyatakan bahwa perubahan lanskap di Sumatera berdampak langsung pada peningkatan risiko bencana hidrometeorologi.<sup>4</sup> Selain itu, penelitian Miettinen et al. (2011) mengungkapkan bahwa konversi hutan rawa gambut di Sumatera tidak hanya meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran, tetapi juga mengganggu sistem tata air alami yang berfungsi sebagai pengatur debit sungai.<sup>5</sup>

Kerusakan daerah aliran sungai menjadi faktor krusial lainnya. Analisis hidrologi berbasis penginderaan jauh menunjukkan bahwa degradasi DAS menyebabkan sedimentasi sungai dan menurunnya kapasitas tampung aliran air.<sup>6</sup> Kondisi ini diperparah oleh tata kelola lahan yang belum terintegrasi dan lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam.<sup>7</sup> Dengan demikian, banjir merupakan refleksi dari persoalan struktural dalam tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan.

Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada

---

<sup>3</sup> J S Tan-Soo et al., "Econometric Evidence on Forest Cover and Flood Risk in Malaysia," *Global Environmental Change* 38 (2016): 250–64, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.03.005>.

<sup>4</sup> W Giesen and E N N Sari, "Tropical Peatland Restoration in Indonesia," *Wetlands Ecology and Management*, 2018.

<sup>5</sup> J Miettinen, C Shi, and S C Liew, "Deforestation Rates in Insular Southeast Asia between 2000 and 2010," *Global Change Biology* 17 (2011): 2261–70, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2011.02398.x>.

<sup>6</sup> I Umar and E A Giofandi, "Land Use Dynamics and Watershed Sustainability in West Sumatra," *Remote Sensing in Earth Systems Sciences*, 2025.

<sup>7</sup> M Di Gregorio and M Moeliono, "Climate Governance and Decentralization in Indonesia," *Regional Environmental Change*, 2023, <https://doi.org/10.1007/s10113-023-02045-3>.

keselamatan jiwa dan kerugian sosial-ekonomi masyarakat. World Bank (2019) melaporkan bahwa kerugian ekonomi akibat bencana hidrometeorologi di Indonesia, termasuk banjir di Sumatera, mencapai miliaran dolar setiap tahunnya dan secara signifikan mempengaruhi kelompok masyarakat rentan.<sup>8</sup> Selain itu, Budiyo et al. (2016) menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi dan perubahan tutupan lahan yang cepat memiliki tingkat kerentanan banjir yang lebih besar.<sup>9</sup>

Pulau Sumatera sebagai salah satu wilayah dengan tutupan hutan terbesar di Indonesia mengalami tekanan lingkungan yang signifikan akibat ekspansi perkebunan skala besar, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Berkurangnya kawasan hutan dan rusaknya daerah aliran sungai (DAS) menyebabkan terganggunya keseimbangan hidrologis, sehingga meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa deforestasi memiliki korelasi langsung dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana banjir di wilayah tropis, termasuk Indonesia.<sup>10</sup> Hal ini menegaskan bahwa banjir di Sumatera merupakan persoalan struktural yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan.

Bukan hanya kerusakan fisik lingkungan dan infrastruktur yang diakibatkan oleh banjir, melainkan juga menyentuh dimensi lainnya seperti, social, ekonomi, kemanusiaan, bahkan kehidupan

---

<sup>8</sup> World Bank, *Indonesia Disaster Risk Finance and Insurance Strategy* (World Bank Publications, 2019), <https://documents.worldbank.org/>.

<sup>9</sup> Y Budiyo et al., "Flood Risk Assessment for Delta Mega-Cities: A Case Study of Jakarta," *Natural Hazards* 75 (2016): 389–413, <https://doi.org/10.1007/s11069-014-1327-9>.

<sup>10</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 23–26.

makhluk hidup lainnya. Kehilangan tempat tinggal, terganggunya mata pencaharian, serta meningkatnya kerentanan kelompok rentan merupakan realitas yang kerap menyertai bencana banjir. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, kondisi ini mencerminkan terancamnya hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang dijamin haknya atas lingkungan hidup yang aman dan sehat.

Pendekatan hukum positif dan kebijakan publik dalam penanggulangan banjir selama ini cenderung bersifat reaktif dan teknis, sehingga belum menyentuh akar persoalan degradasi lingkungan secara komprehensif.<sup>11</sup> Oleh karena itu, artikel ini menawarkan perspektif *Maqashid al-Syariah* sebagai kerangka analisis normatif dan etis dalam menelaah fenomena banjir di Sumatera. Konsep *Maqashid al-Syariah* menempatkan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*) sebagai tujuan utama hukum Islam, sehingga relevan digunakan untuk mengkaji isu lingkungan hidup dan bencana ekologis.<sup>12</sup>

Mengingat konteks yang diuraikan sebelumnya, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis banjir di Sumatera sebagai dampak degradasi lingkungan serta mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*. Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi akademis terhadap perluasan kajian hukum Islam dan isu lingkungan hidup, sekaligus menjadi rujukan normatif bagi perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

---

<sup>11</sup> Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 52–55.

<sup>12</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 7–10.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kajian hukum normatif dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan konseptual yang disandingkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, literatur hukum, buku-buku fikih dan *Maqāsid al-Syarī'ah*, serta artikel jurnal nasional yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan fenomena banjir di Sumatera dengan konsep degradasi lingkungan dan tujuan-tujuan *Maqāsid al-Syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Banjir di Sumatera sebagai Dampak Degradasi Lingkungan**

Fenomena banjir yang terjadi secara berulang di berbagai wilayah Pulau Sumatera tidak terlepas dari persoalan degradasi lingkungan yang bersifat structural dan sistemik. Adanya erubahan tata guna lahan, khususnya alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pertambangan, dan pemukiman telah menyebabkan menurunnya daya dukung dan ketahanan lingkungan hidup. Deforestasi yang masif menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, sehingga limpasan permukaan meningkat dan memicu terjadinya banjir di daerah hilir.<sup>13</sup>

Para ahli lingkungan hidup Indonesia telah menunjukkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap munculnya permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Elemen-elemen yang

---

<sup>13</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* (Jakarta: Gramedia, 2014). 45-47

berkontribusi ini dirinci dalam tabel yang disajikan di bawah ini.<sup>14</sup>

**Tabel 1: *publikasi buku para pakar lingkungan hidup***

No	Nama Pakar	Tahun Publikasi	Permasalahan Lingkungan Hidup
1.	M. T. Zen	1979	1) Manusia Indonesia 2) Sumber Daya Alam 3) Dinamika sosial yang terus mengalami perubahan 4) Teknologi
2.	St. Munajat Danusaputra	1980	1) Kemiskinan 2) Demografi 3) Kekotoran 4) Kebijakan
3.	Koesnadi Hardjasoeman tri	1983	1) Ekspansi Populasi 2) Pertumbuhan sumber daya alam dan lingkungan 3) Kemajuan teknologi dan kebudayaan 4) Kemajuan di bidang internasional

---

<sup>14</sup> Pernyataan dalam tabel tersebut dibuat berdasarkan tahun pertama publikasi buku para pakar lingkungan hidup tersebut. Untuk perbandingan lihat juga Saifullah, Hukum Lingkungan: Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekragaman Hayati (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 23.

4.	Emil Salim	1988	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dinamika Populasi dan Sumber Daya Manusia</li> <li>2) Mengamankan persediaan pangan</li> <li>3) Spesies dan ekosistem berfungsi sebagai sumber daya bagi pembangunan</li> <li>4) Fungsi Energi</li> <li>5) Industry</li> <li>6) Penyebaran Perkotaan</li> </ol>
5.	Otto Soemarwoto	1992	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepunahan Spesies/Keanekaragaman hayati</li> <li>2) Pemanasan global/perubahan iklim</li> <li>3) Menipisnya lapisan ozon</li> <li>4) Hujan asam</li> </ol>
6.	M. Soerjani	1997	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mutase Gen tersembunyi</li> <li>2) Dampak rumah kaca</li> <li>3) Hujan asam</li> <li>4) Lubang lapisan ozon</li> </ol>



			5) Kontaminasi dari limbah dan bahan berbahaya 6) Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya 7) Kesenjangan sosial
--	--	--	--

**Sumber:** *Abdul Quddus, Menggagas Fiqih Al-Bi'ah Sebagai Basis Etis-Praktis Konservasi Alam, 2015, halaman 207-208.*

Dari beberapa permasalahan kerusakan lingkungan yang disebutkan oleh beberapa para ahli lingkungan hidup diatas, dapat dikatakan bahwasannya selain deforestasi, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) juga menjadi faktor signifikan. Aktivitas penambangan tanpa reklamasi yang memadai, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, serta lemahnya pengawasan terhadap pencemaran sungai memperparah kondisi hidrologis. Banjir yang semula bersifat musiman kemudian berubah menjadi bencana tahunan dengan intensitas dan dampak yang semakin besar.<sup>15</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir di Sumatera bukan semata-mata bencana alam, melainkan bencana ekologis yang dipicu oleh kebijakan pembangunan yang abai terhadap prinsip keberlanjutan.

### **Alih Fungsi Lahan sebagai Penyebab Banjir di Sumatera**

Alih fungsi lahan merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir

---

<sup>15</sup> A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010). 112-115

di Pulau Sumatera.<sup>16</sup> Perubahan tutupan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertanian intensif, pertambangan, serta kawasan permukiman telah mengubah karakteristik hidrologis bentang alam secara signifikan. Secara ekologis, hutan berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan air melalui sistem perakaran, serasah, dan struktur tanah yang mampu meningkatkan infiltrasi serta menekan limpasan permukaan (*runoff*). Ketika hutan dikonversi menjadi lahan terbangun atau monokultur, kapasitas tersebut menurun drastis.<sup>17</sup>

Di Sumatera, laju deforestasi termasuk yang tertinggi di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Margono et al. (2014) menunjukkan bahwa kehilangan hutan primer di Indonesia periode 2000–2012 terjadi secara masif di Sumatera dan Kalimantan, terutama akibat ekspansi perkebunan dan konsesi industri.<sup>18</sup> Temuan ini diperkuat oleh Miettinen et al. (2011) yang mencatat konversi hutan rawa gambut Sumatera secara luas, yang berdampak pada terganggunya sistem tata air alami dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.<sup>19</sup>

Secara empiris, hubungan antara kehilangan tutupan hutan dan peningkatan risiko banjir telah dibuktikan melalui pendekatan ekonometrik dan spasial. Tan-Soo et al. (2016) menemukan bahwa berkurangnya tutupan hutan secara signifikan meningkatkan

---

<sup>16</sup> Poly Antes Toboroza and Doris Febriyanti, “Peran WALHI Sumatera Selatan Dalam Mengadvokasi Masalah Banjir Di Kota Palembang Tahun 2024,” *TheJournalish: Social and Government* 6, no. 1 (2025): 87–98.

<sup>17</sup> L A Bruijnzeel, “Hydrological Functions of Tropical Forests: Not Seeing the Soil for the Trees?,” *Agriculture, Ecosystems & Environment* 104, no. 1 (2004): 185–228, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2004.01.015>.

<sup>18</sup> Margono et al., “Primary Forest Cover Loss in Indonesia over 2000–2012.”

<sup>19</sup> Miettinen, Shi, and Liew, “Deforestation Rates in Insular Southeast Asia between 2000 and 2010.”

probabilitas kejadian banjir di wilayah hilir.<sup>20</sup> Meskipun studi tersebut berbasis di Malaysia, karakteristik ekosistemnya serupa dengan Sumatera, sehingga relevan secara regional. Selain itu, Carlson et al. (2012) menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit di Indonesia mengakibatkan perubahan drastis dalam struktur tanah dan siklus hidrologi, yang berdampak pada peningkatan limpasan dan erosi.<sup>21</sup>

Konversi lahan gambut di Sumatera juga memperburuk kerentanan terhadap banjir. Hutan gambut berfungsi sebagai penyimpan air alami (natural water reservoir). Ketika dikeringkan untuk perkebunan atau pembangunan, terjadi penurunan muka tanah (subsidence) serta berkurangnya kapasitas retensi air.<sup>22</sup> (Penelitian oleh Page et al. (2011) menjelaskan bahwa degradasi gambut tropis di Asia Tenggara mengakibatkan gangguan sistem hidrologi yang berdampak langsung pada peningkatan risiko banjir dan kekeringan secara bersamaan.<sup>23</sup>

Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) akibat alih fungsi lahan juga berkontribusi terhadap sedimentasi sungai dan penurunan kapasitas tampung aliran air. Analisis berbasis penginderaan jauh oleh Wells et al. (2016) menunjukkan bahwa perubahan lanskap skala besar di Sumatera berhubungan dengan peningkatan kejadian

---

<sup>20</sup> Tan-Soo et al., "Econometric Evidence on Forest Cover and Flood Risk in Malaysia."

<sup>21</sup> K M Carlson et al., "Committed Carbon Emissions, Deforestation, and Community Land Conversion from Oil Palm Plantation Expansion in West Kalimantan, Indonesia," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 109, no. 19 (2012): 7559–64, <https://doi.org/10.1073/pnas.1200452109>.

<sup>22</sup> Giesen and Sari, "Tropical Peatland Restoration in Indonesia."

<sup>23</sup> S E Page, J O Rieley, and C J Banks, "Global and Regional Importance of the Tropical Peatland Carbon Pool," *Global Change Biology* 17, no. 2 (2011): 798–818, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02279.x>.

bencana berbasis hidrometeorologi.<sup>24</sup> Selain itu, penelitian Budiyo et al. (2016) menegaskan bahwa urbanisasi cepat dan perubahan tutupan lahan meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir, terutama di kawasan padat penduduk.<sup>25</sup> Dari perspektif tata kelola, Di Gregorio & Moeliono (2023) menyoroti bahwa desentralisasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas pengawasan lingkungan yang memadai. Hal ini menyebabkan lemahnya pengendalian alih fungsi lahan, terutama di wilayah dengan tekanan ekonomi tinggi seperti Sumatera.<sup>26</sup>

Dengan demikian, alih fungsi lahan di Sumatera bukan hanya persoalan perubahan fisik lanskap, tetapi juga persoalan struktural dalam tata kelola pembangunan. Hal ini juga ditegaskan oleh Jaksa Agung yang menyatakan bahwa alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor penyebab banjir di Sumatra.<sup>27</sup> Banjir yang berulang mencerminkan ketidakseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian konversi lahan, restorasi hutan dan gambut, serta penguatan pengelolaan DAS berbasis ekosistem menjadi langkah strategis dalam mitigasi banjir yang berkelanjutan.

---

<sup>24</sup> J A Wells and et al., "Rising Flood Hazard in Indonesia," *Environmental Research Letters* 11 (2016): 94003, <https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/9/094003>.

<sup>25</sup> Budiyo et al., "Flood Risk Assessment for Delta Mega-Cities: A Case Study of Jakarta."

<sup>26</sup> Di Gregorio and Moeliono, "Climate Governance and Decentralization in Indonesia."

<sup>27</sup> Moehammad Wahyudin, "Jaksa Agung: Banjir Sumatera Disebabkan Masifnya Alih Fungsi Lahan," 2025, <https://rm.id/baca-berita/nasional/294938/bukan-fenomena-alam-biasa-jaksa-agung-banjir-sumatera-disebabkan-masifnya-alih-fungsi-lahan>.

## **Dampak Sosial, Ekonomi, dan Kemanusiaan Akibat Banjir di Sumatera**

Peristiwa banjir tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik terhadap infrastruktur dan lingkungan, namun juga mempunyai dampak yang cukup besar terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat bahkan makhluk hidup lainnya. Kehilangan tempat tinggal, terganggunya akses pendidikan dan kesehatan, serta terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat merupakan konsekuensi nyata dari bencana banjir.<sup>28</sup> Kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat miskin menjadi pihak yang paling terdampak, karena memiliki kapasitas adaptasi dan pemulihan yang terbatas.

Dalam penelitian ini, banjir juga dapat dipahami sebagai persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial. Ketika negara gagal memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, maka hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas hidup yang layak dan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat, turut terancam.<sup>29</sup> Oleh karena itu, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis, melainkan membutuhkan kerangka normatif dan etis yang menempatkan manusia dan kelestarian lingkungan sebagai satu kesatuan.

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat dari banjir di Sumatera ini mencakup beberapa aspek, mulai dari aspek infrastruktur, kemanusiaan, ekonomi, dan social, yaitu:

1. Dari aspek infrastruktur, berdasarkan BNPB terdapat banyak infrastruktur yang rusak, seperti 178.479 rumah, 215 fasilitas

---

<sup>28</sup> “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,” 2007.

<sup>29</sup> “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 2009. Pasal 65 ayat (1).

Kesehatan, 3.188 fasilitas Pendidikan, 803 rumah ibadah, 34 jembatan putus, dan 81 jalan terputus.

2. Dari aspek kemanusiaan, berdasarkan BNPB terdapat 1.157 korban meninggal dunia, 165 jiwa hilang, dan 381,1 ribu jiwa mengungsi.<sup>30</sup>
3. Dari aspek ekonomi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 4,9%. Namun, beberapa provinsi yang terdampak bencana mencatat adanya penurunan kinerja lebih rendah, seperti Aceh sebesar 4,5%, Sumatra Barat sebesar 3,4%, dan Sumatra Utara sebesar 4,6%.<sup>31</sup>
4. Dari aspek social, dampak yang terjadi akibat fenomena banjir ini yaitu adanya potensi konflik social dan kecemburuan akibat distribusi bantuan. Hal ini lantaran data penerima manfaat yang kurang jelas, kurangnya transparansi, dan distribusi bantuan yang tidak merata atau tidak tepat sehingga menimbulkan kesenjangan social untuk korban bencana.

Dari beberapa aspek diatas, menggambarkan bahwasannya fenomena yang terjadi bukanlah bencana kecil yang datang begitu saja, melainkan bencana alam besar yang terjadi bukan hanya akibat dari cuaca yang ekstrem, tetapi juga adanya kegiatan deforestasi yang menjadi penyebab adanya bencana alam ini. Tentunya untuk mengembalikan semuanya tidak membutuhkan waktu yang sebentar.

---

<sup>30</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Geoportal BNPB," January 2, 2025, <https://gis.bnpb.go.id/>.

<sup>31</sup> Alfi Dinilhaq, "Dampak Banjir Sumatera Ke Ekonomi RI Tekan PDB, Kemiskinan Bertambah," January 2, 2026, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/2950031/dampak-banjir-sumatera-ke-ekonomi-ri-tekan-pdb-kemiskinan-bertambah>.

### **Degradasi Lingkungan Perspektif Maqashid al – Syari'ah**

Pada kenyataannya, pelestarian lingkungan hidup tidak hanya dibahas dalam fiqh saja, namun juga dalam ushul fiqh, khususnya dalam penjelasan tujuan utama hukum Islam yang dikenal dengan maqashid al-syari'ah. Maqashid al-syari'ah berorientasi pada penjagaan dan perbaikan urusan agama dan dunia; jika prinsip-prinsip inti ini diabaikan, kesejahteraan global akan gagal terwujud, sehingga menyebabkan kehancuran dan hilangnya kesenangan yang melekat pada keberadaan manusia. Terdapat lima prinsip *Maqashid al – Syari'ah*, yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), dapat dijadikan kerangka analisis dalam memahami persoalan banjir akibat degradasi lingkungan.<sup>32</sup>

Terlihat dari lima kategori yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap individu hendaknya menghormati hakikat kehidupan, menghargai kebebasan berpikir dan mengemukakan gagasan, melindungi kelangsungan generasi, menghormati hak milik setiap orang, dan tentu saja menghargai keberagaman semua orang.<sup>33</sup> Namun, melihat kondisi kontemporer lingkungan, kelima prinsip tersebut dirasa tidak memadai lagi dan perlu adanya peninjauan ulang atau bahkan perluasan prinsip yang mewakili kepedulian terhadap lingkungan hidup adalah konsep *Hifz al-bi'ah*. Menurut Yusuf al-Qardlawi sebagaimana dijelaskan dalam *Ri'ayatu al-Bi'ah fi*

---

<sup>32</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004).

<sup>33</sup> A Quddus, "Menggagas Fiqih Al-Bi'ah Sebagai Basis Etis-Praktis Konservasi Alam," *Journal of Islamic Studies*, 2015, 213.

*al-Shari'ati al-Islamiyyah*, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga lima prinsip *Maqashid al-Syari'ah*.<sup>34</sup>

Dalam konteks *sustainable environment* sesungguhnya kelima prinsip *maqashid al-syari'ah* sudah cukup dalam konteks lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan tidak diperlukan penambahan jika pemahamannya diperluas. *Hifz al-Nasl* misalnya, memiliki makna yang selaras dengan menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam demi keberlangsungan generasi mendatang. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan sumber dayanya untuk menjamin kehidupan di masa depan.

Dalam konteks banjir di Sumatera, prinsip *hifz al-nafs* menjadi sangat relevan karena banjir mengancam keselamatan jiwa manusia. Korban jiwa, penyakit pascabanjir, dan trauma psikologis menunjukkan adanya kegagalan dalam menjaga hak hidup manusia. Selain itu, *hifz al-mal* juga terlanggar akibat rusaknya harta benda dan sumber penghidupan masyarakat.<sup>35</sup> Kerusakan lingkungan yang terus dibiarkan pada akhirnya juga mengancam keberlangsungan generasi mendatang, sehingga bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang disampaikan sebelumnya, jelas bahwa banjir yang terjadi di berbagai wilayah di Pulau Sumatera merupakan dampak nyata dari degradasi lingkungan

---

<sup>34</sup> Yusuf al-Qardawi, *Ri'ayat Al-Bi'Ah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001). 64

<sup>35</sup> Yusuf al-Qardawi, *Ri'ayatul Al-Bi'ah Fi Al-Shari'ati Al-Islamiyyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022). 55-58



yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Dampak banjir tidak hanya mencakup kerusakan ekologis, namun juga berdampak signifikan terhadap dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan masyarakat. Dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*, fenomena banjir akibat degradasi lingkungan bertentangan dengan tujuan inti hukum Islam, khususnya perlindungan kehidupan, harta benda, dan keberlangsungan generasi mendatang. Maka dari itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan normatif-etis berbasis *Maqashid al-Syariah* dalam merumuskan kebijakan lingkungan dan penanggulangan bencana. Negara dan masyarakat perlu bersinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai amanah bersama. Dengan demikian, upaya pencegahan banjir tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berfokus pada keadilan ekologis serta keberlanjutan kehidupan manusia di masa depan.

## REFERENSI

- al-Qardawi, Yusuf. *Ri'ayat Al-Bi'Ab Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- . *Ri'ayatul Al-Bi'ab Fi Al-Shari'ati Al-Islamiyyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Bank, World. *Indonesia Disaster Risk Finance and Insurance Strategy*. World Bank Publications, 2019. <https://documents.worldbank.org/>.
- Bencana, Badan Nasional Penanggulangan. "Geoportal BNPB," January 2, 2025.

- <https://gis.bnpb.go.id/>.
- Bradley, A V, and et al. "Flood Risk and Land-Use Change in Southeast Asia." *Natural Hazards and Earth System Sciences* 20 (2020): 2565–81. <https://doi.org/10.5194/nhess-20-2565-2020>.
- Bruijnzeel, L A. "Hydrological Functions of Tropical Forests: Not Seeing the Soil for the Trees?" *Agriculture, Ecosystems & Environment* 104, no. 1 (2004): 185–228. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2004.01.015>.
- Budiyono, Y, J C J H Aerts, J J Brinkman, M A Marfai, and P J Ward. "Flood Risk Assessment for Delta Mega-Cities: A Case Study of Jakarta." *Natural Hazards* 75 (2016): 389–413. <https://doi.org/10.1007/s11069-014-1327-9>.
- Carlson, K M, L M Curran, D Ratnasari, and et al. "Committed Carbon Emissions, Deforestation, and Community Land Conversion from Oil Palm Plantation Expansion in West Kalimantan, Indonesia." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 109, no. 19 (2012): 7559–64. <https://doi.org/10.1073/pnas.1200452109>.
- Dinilhaq, Alfi. "Dampak Banjir Sumatera Ke Ekonomi RI Tekan PDB, Kemiskinan Bertambah," January 2, 2026. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/2950031/dampak-banjir-sumatera-ke-ekonomi-ri-tekan-pdb-kemiskinan-bertambah>.
- Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Giesen, W, and E N N Sari. "Tropical Peatland Restoration in Indonesia." *Wetlands Ecology and Management*, 2018.
- Gregorio, M Di, and M Moeliono. "Climate Governance and Decentralization in Indonesia." *Regional Environmental Change*, 2023. <https://doi.org/10.1007/s10113-023-02045-3>.
- Keraf, A Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas, 2010.

- Margono, B A, P V Potapov, S Turubanova, and et al. "Primary Forest Cover Loss in Indonesia over 2000–2012." *Nature Climate Change* 4 (2014): 730–35. <https://doi.org/10.1038/nclimate2277>.
- Miettinen, J, C Shi, and S C Liew. "Deforestation Rates in Insular Southeast Asia between 2000 and 2010." *Global Change Biology* 17 (2011): 2261–70. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2011.02398.x>.
- Page, S E, J O Rieley, and C J Banks. "Global and Regional Importance of the Tropical Peatland Carbon Pool." *Global Change Biology* 17, no. 2 (2011): 798–818. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02279.x>.
- Quddus, A. "Menggagas Fiqih Al-Bi'ah Sebagai Basis Etis-Praktis Konservasi Alam." *Journal of Islamic Studies*, 2015, 213.
- Tan-Soo, J S, N Adnan, I Ahmad, S K Pattanayak, and J R Vincent. "Econometric Evidence on Forest Cover and Flood Risk in Malaysia." *Global Environmental Change* 38 (2016): 250–64. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.03.005>.
- Toboroza, Poly Antes, and Doris Febriyanti. "Peran WALHI Sumatera Selatan Dalam Mengadvokasi Masalah Banjir Di Kota Palembang Tahun 2024." *TheJournalish: Social and Government* 6, no. 1 (2025): 87–98.
- Umar, I, and E A Giofandi. "Land Use Dynamics and Watershed Sustainability in West Sumatra." *Remote Sensing in Earth Systems Sciences*, 2025.
- "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," 2007.
- "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 2009.
- Wahyudin, Moehammad. "Jaksa Agung: Banjir Sumatera Disebabkan Masifnya Alih Fungsi Lahan," 2025. <https://rm.id/baca-berita/nasional/294938/bukan-fenomena-alam-biasa-jaksa-agung-banjir->

sumatera-disebabkan-masifnya-alih-fungsi-lahan.

Wells, J A, and et al. "Rising Flood Hazard in Indonesia." *Environmental Research Letters* 11 (2016): 94003. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/9/094003>.